

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Ketua Indonesia *Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) dan Pimpinan Telekomunikasi Indonesia

Hari, Tanggal : Senin, 21 Februari 2011
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H. Hayono Isman, S.IP.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Penjelasan mengenai Kebocoran Data Pelanggan dan Kerahasiaan Informasi

Hadir : - 32 orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI
- Ketua BRTI, Syukri Batubara
- Ketua Pelaksana ID-SIRTII, Prof. DR. Eko Indrajit
- Direktur PT. Sampoerna Telecom, Rudi Martinez
- Dirut PT. Smart Telecom, Sutikno Widjaja
- Dirut PT. Telkomsel, Sarwoto Hatmo Sutarno
- Direktur CRM PT. Telkom Indonesia, Prasetio
- *Chief Corporate Services Officer* Indosat, Noor SDK Devi
- Direktur Jaringan XL Asiat, Dian Siswarini
- Direktur PT. Bakrie Telecom, Tbk., Rahmat Junaidi
- Corporate Secretary Mobile-8, Chris Taufik

- PGM. *Business Strategy* Hutchison Telecom, Hari Sucipto
- Manager Operasional Batam Bintang Telekomunikasi, Tri Putra Prawoto
- Direktur Axis, Syakieb Sungkar

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Ketua Indonesia *Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) dan Pimpinan Telekomunikasi Indonesia pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN KOMISI I DPR RI

Setelah mendapatkan penjelasan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Indonesia *Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) dan Pimpinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia, Komisi I DPR memberikan catatan sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, Komisi I DPR RI minta agar BRTI bekerja secara cepat dalam menindaklanjuti permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan privasi publik sebagai pengguna jasa telekomunikasi serta menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan pelanggaran/penyimpangan dengan tetap merujuk peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR RI juga meminta BRTI membuat mekanisme yang efisien dan efektif (*call center/short number* yang mudah diingat) untuk menampung pengaduan pelanggan.
2. Sehubungan dengan adanya dugaan kebocoran data pelanggan, Komisi I DPR RI minta BRTI agar segera melakukan investigasi untuk menemukan faktor penyebab kebocoran data termasuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dalam rentang waktu satu bulan dan menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai kewenangannya kepada pelaku yang membocorkan data pelanggan tersebut.

3. Guna melindungi kepentingan, kenyamanan, sekaligus privasi pengguna jasa telekomunikasi, Komisi I DPR RI meminta kepada para Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, membuat mekanisme yang cepat dan efektif untuk menampung pengaduan pelanggan terkait dengan kebocoran data dan “gangguan” pelanggan (semacam *call center/short number* yang mudah diingat) berikut solusi teknis dalam rentang waktu satu bulan serta mensosialisasikan *call center/short number* tersebut kepada publik.
4. Mengingat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan cepat dan berpeluang terhadap munculnya ancaman terhadap jaringan telekomunikasi (*cyber attack*) baik dalam negeri maupun luar negeri, Komisi I DPR RI minta kepada ID-SIRTII untuk bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengamanan terhadap *critical infrastructure* serta melakukan sosialisasi dengan pihak terkait dalam melakukan pemantauan, pendektasian dan peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi. Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR RI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkominfo agar kinerja ID-SIRTII optimal.
5. Komisi I DPR RI meminta kepada BRTI, ID-SIRTII dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi (TIPITI), Konvergensi Telematika, Intelijen, dan Keamanan Nasional.
6. Komisi I DPR RI akan mengagendakan secara khusus guna membahas tagihan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia .

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Jakarta, 21 Februari 2011

KETUA RAPAT,

H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450